

## Propaganda Ancaman Politik Identitas dalam Teks Pidato Jokowi

Ridwan Imamul Huda<sup>1</sup>, Idi Dimiyati<sup>2</sup>, Ail Muldi<sup>3</sup>

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
rimamulhuda@gmail.com<sup>1</sup>

### ABSTRAK

*Dalam kajian wacana, sebuah teks tidaklah netral dari nilai-nilai pembuat atau penuturnya yang diwujudkan dalam pemilihan kosakata. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap propaganda ancaman politik identitas pada teks pidato Jokowi. Data penelitian diambil dari [www.setkab.go.id](http://www.setkab.go.id) tentang pidato Presiden pada tahun 2020-2023. Penelitian menggunakan analisis wacana kritis dengan pendekatan Fairclough yang membagi analisis ke dalam tiga lapis: analisis teks, analisis discourse practice dan social practice. Berdasarkan hasil penelitian selama 2020-2023 terdapat sebelas teks pidato Jokowi yang memuat wacana politik identitas. Dalam analisis teks, propaganda Jokowi terlihat lewat adanya name calling melalui penggunaan majas metonimia untuk politik identitas berupa politisasi SARA dan politisasi agama. Dalam analisis praktik wacana (discourse practice), propaganda terlihat dari adanya ikatan psikologis sebagai partai koalisi pemerintah bagi PPP dan PAN untuk bersikap yang sama dengan Jokowi meskipun keduanya merupakan partai berlandaskan identitas agama (Islam). Terlihat juga adanya keseragaman pandangan lembaga-lembaga yang berada di bawah naungan Presiden Jokowi. Dalam analisis social practice, menunjukkan bahwa propaganda saat ini yang melekatkan politik identitas sebagai politisasi SARA dan agama, telah berhasil memisahkan politik identitas dari politik perjuangan kaum minoritas atas hegemoni mayoritas serta berhasil menutupi bentuk-bentuk lain dari politik identitas.*

**Kata Kunci:** Analisis Wacana Kritis, Politik Identitas, Propaganda.

### ABSTRACT

*In discourse studies, a text is not neutral from the author's or speaker's values, which are realized in the choice of vocabulary. This study aims to reveal the propaganda of the threat of identity politics in the text of Jokowi's speech. The research data was taken from [www.setkab.go.id](http://www.setkab.go.id) about the President's speech in 2020-2023. The research uses critical discourse analysis with Fairclough's approach, which divides the analysis into three levels: text analysis, discourse practice analysis, and social practice. Based on the results of the study during 2020-2023, there were eleven texts of Jokowi's speeches that contained identity politics discourse. In the textual analysis, Jokowi's propaganda can be seen through name calling through the use of metonymy for identity politics in the form of SARA and religious politicization. In the analysis of discourse practice, propaganda is seen from the existence of psychological ties as a government coalition party for PPP and PAN to behave the same as Jokowi even though both are parties based on religious identity (Islam). There is also uniformity in the views of institutions under President Jokowi. The social practice analysis shows that the current propaganda that attaches identity politics as the politicization of SARA and religion has succeeded in separating identity politics from the politics of minority struggle against majority hegemony and has succeeded in covering other forms of identity politics.*

**Keywords:** Critical Discourse Analysis, Identity politics, Propaganda

## A. PENDAHULUAN

Pidato bukan semata alat komunikasi penguasa kepada rakyatnya, melainkan sebagai sarana strategis untuk berkuasa. Bagi Piere Bourdieu, kosakata dalam pidato tidak hanya mencerminkan status sosial belaka, tetapi lebih dari itu, digunakan juga untuk mempertahankan dan melegitimasi kekuasaan (Ningtyas, 2015). Kosakata dalam sebuah pidato sangat menentukan karena berhubungan dengan pertanyaan bagaimana realitas sosial direpresentasikan dalam sebuah pidato. Representasi yang ditampilkan dalam sebuah teks pidato pemegang kekuasaan memiliki dampak besar untuk menggiring ideologi dan opini masyarakat (Hall, 1997). Hal ini juga berlaku terhadap pidato seorang Jokowi sebagai pemegang kekuasaan ketika menyinggung politik identitas.

Wacana politik identitas merupakan wacana yang semakin diperhatikan dalam lanskap politik kontemporer, terutama dalam tahun-tahun politik. Dalam periode 2020-2023, peneliti menemukan Jokowi menyinggung politik identitas dalam beberapa kesempatan pidatonya. Pidato-pidato Jokowi terkait politik identitas menjadi

perhatian peneliti karena sebagai pemegang kekuasaan, apa yang disampaikan Jokowi akan membawa pengaruh luas terhadap ideologi dan opini yang berkembang di masyarakat.

Penelitian tentang politik identitas sudah banyak dilakukan, diantaranya adalah:

Kriess et al, 2020, dengan penelitian *"Political Identity Ownership: Symbolic Contestes to Represent Member of Public"*, penelitian yang berusaha mengungkap konsep kepemilikan identitas dalam konteks kampanye politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam proses kampanye pemilihan, kandidat seringkali menselaraskan identitasnya dengan kelompok yang dukungannya mereka cari. Tidak hanya menselaraskan, namun kandidat juga berusaha mengklaim hak dirinya sebagai figur yang memiliki otoritas atau legitimasi. Klaim ini pada akhirnya turut memperkuat posisi politik identitas dalam demokrasi (Kreiss et al., 2020).

Sementara Schubert, K., 2023, lewat penelitiannya, *"Identity Politics and The Democratization of Democracy: Oscillations Between Power and Reason in Radical Democratic and Standpoint Theory"*, memahami bahwa politik

identitas adalah bagian integral dari proses demokratisasi. Meskipun ada keragaman dalam politik identitas, secara umum, politik identitas berkontribusi pada demokratisasi dan inklusivitas, asalkan tidak berubah menjadi politik kepentingan kelompok yang eksklusif (Schubert, 2023). Hal yang sama juga disimpulkan dalam penelitian, Horz, C. M. (2023), yang berjudul, *"Identity Propaganda"*. Horz melihat bahwa propaganda, khususnya yang menggunakan politik identitas bisa memiliki nilai strategis sebagai perekat soliditas antara penguasa dengan pengikutnya, namun dia juga bisa menjadi instrumen diskriminasi yang sangat merusak dalam demokrasi (Horz, 2023).

Dari beragam penelitian yang sudah dilakukan, masih sedikit penelitian yang mendasarkan pada analisis teks dengan pendekatan kritis. Diantara penelitian tersebut adalah penelitian Haryono dan Djunaedi Setyawan yang berjudul, *"Makna Dibalik Pesan Politik Kebangsaan Presiden Jokowi"*. Sebuah penelitian analisis wacana kritis terhadap pernyataan sikap Presiden Jokowi dalam menanggapi kerusuhan rasial di Papua dan Papua Barat. Melalui pendekatan Fairclough, pada bagian

produksi dari analisis praktik wacana (*discourse practice*) peneliti mengungkapkan bahwa pengalaman hidup Jokowi telah membuatnya memandang kerusuhan bernuansa SARA sebagai persoalan yang penting untuk dikendalikan (Haryono & Setyawan, 2019). Namun demikian, penelitian ini tidak secara langsung menyinggung persoalan politik identitas. Beberapa penelitian terbaru di dalam negeri yang bertemakan politik identitas seperti (Imran et al., 2024; Prasetya, 2023; Syarwi, 2022) juga belum mengungkap sisi politik identitas secara komperhensif, karena hanya memotret politik identitas sebagai politisasi SARA atau agama.

Lewat teks pidato Jokowi, penelitian ini berusaha mengungkap bagaimana Jokowi melakukan propaganda wacana ancaman politik identitas dalam teks pidatonya. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan perspektif kritis terhadap teks pidato Jokowi yang bagi sebagian orang dinilai sesuatu yang 'normatif'. Tujuan lainnya dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan bahwa politik identitas tidak hanya berupa politisasi SARA atau agama.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

Pidato dan propaganda tidak secara otomatis identik, tetapi keduanya memiliki hubungan erat dalam konteks komunikasi politik. Harold Lasswell dalam teori komunikasi dan propaganda menekankan bahwa propaganda adalah teknik mengendalikan opini melalui simbol (Lasswell, 1927). Jika pidato dirancang untuk memengaruhi opini publik dan membawa tujuan politik tertentu, maka pidato tersebut dapat dianggap sebagai propaganda.

Propaganda sering diasosiasikan dengan penyebaran ideologi ataupun ancaman pada masa perang. Penggunaan propaganda dalam Perang Dunia pertama dan kedua serta selama Perang Dingin telah menguatkan propaganda sebagai strategi dalam sebuah peperangan. Padahal jika melihat propaganda sebagai kegiatan memobilisasi sikap dan opini masyarakat, maka propaganda tidak dibatasi pada masa perang maupun damai serta telah berlangsung sepanjang sejarah kemanusiaan (*The Story of Propaganda* | AHA, 2018).

Lasswell, tahun 1937, dalam (Munthe, 2012), mendefinisikan propaganda dalam arti yang luas sebagai teknik memengaruhi tindakan

manusia dengan memanipulasi representasi (penyajian). Representasi bisa berbentuk lisan, tulisan, gambar maupun musik. Dalam pengertian Lasswell tersebut, penggunaan propaganda terlihat lebih umum, setiap saat bisa dilakukan baik dalam keadaan perang, genting ataupun damai (Haryanto, 2015; Munthe, 2012).

Dari pernyataan Lasswell terkait representasi dan propaganda di atas, tidak secara langsung memiliki pengertian yang sama. Representasi mengacu pada bagaimana suatu ide atau kelompok disampaikan, sementara propaganda menggunakan representasi untuk memanipulasi persepsi demi kepentingan tertentu. Lasswell sendiri menekankan pentingnya analisis struktur komunikasi dalam propaganda, tetapi tidak secara eksplisit menyamakan representasi sebagai propaganda. Ia lebih fokus pada alat, teknik, dan efek propaganda dalam menciptakan pengaruh sosial dan politik.

Propaganda merupakan bentuk kontrol sosial untuk mempertahankan ketaatan masyarakat kepada penguasa (Lasswell, 1927). Propaganda dilakukan ketika adanya kepentingan penguasa untuk menggalang sikap dan opini

masyarakat luas agar selaras dengan kepentingannya. Begitu halnya dalam persoalan politik identitas yang memiliki pro dan kontra di masyarakat, penguasa berkepentingan untuk menyatukan opini dan sikap masyarakat agar kontrol sosial bisa tercipta.

Politik identitas sendiri dihubungkan dengan agenda, aksi, aktivitas politik anggota kelompok yang berbasis identitas untuk melawan ketidakadilan yang dialami karena struktur, sistem, dan praktik yang hegemonik (Heyes C., 2020); Politik identitas dalam diskursus barat direferensikan dengan biopolitik; sebuah diskursus yang mendorong kesetaraan ras, gender dan seks dalam ruang demokrasi (Ludwig, 2021). Politik identitas memiliki beragam bentuk, politik identitas di Amerika tampil sebagai gerakan kulit hitam dalam memperjuangkan hak-haknya melawan supermasi kulit putih (Bennett, 2012). Bentuk lain politik identitas yang kerap terlupakan adalah politik afirmasi seperti adanya otonomi khusus di beberapa daerah di negara kita sebagai bentuk pengakuan atas identitas daerah (Nordholt, 2018).

Namun demikian, di Indonesia keberadaan politik identitas telah menimbulkan polemik, dalam hal politik

dan agama. Diskursus politik identitas di Indonesia selalu terpolarisasi ke dalam perebutan identitas keagamaan dan nasionalisme (Mubarok, 2023; Salahudin, 2021). Politik identitas di Indonesia kerap dipotret dalam wajah identitas agama, khususnya Islam yang terus bekelindan dengan agenda-agenda politisi dalam perebutan kekuasaan (Ardipandanto, 2020; Herianto & Wijanarko, 2022). Kondisi ini mendorong politik identitas lebih dinilai negatif sebagai lawan dari ideologi nasionalisme. Hal ini menjadikan politik identitas begitu tabu untuk dibicarakan di ruang publik.

Politik identitas dianggap tabu untuk dibicarakan di ruang publik karena sering kali dikaitkan dengan isu-isu sensitif seperti agama, etnisitas, atau budaya, yang berpotensi memecah belah masyarakat. Tabu di sini berarti bahwa diskusi tentang politik identitas cenderung dihindari karena dapat memicu konflik, mempertegas stereotip, atau menciptakan ketegangan antar kelompok. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa penggunaan politik identitas dapat mengalihkan perhatian dari isu-isu yang lebih substansial dan universal, seperti kebijakan atau kesejahteraan masyarakat.

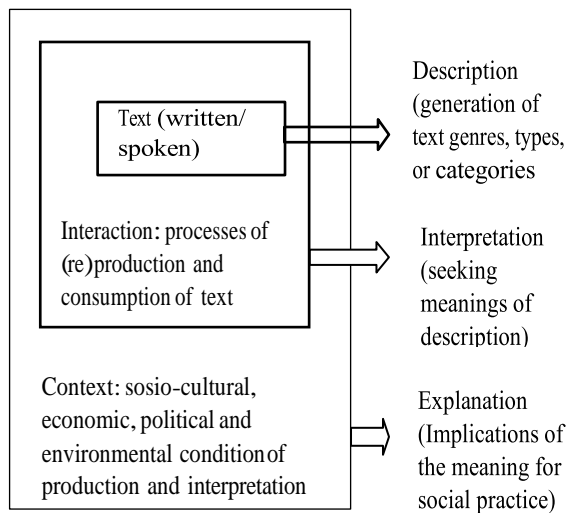
Menurut Foucault, (Foucault, 1972), ketabuan (*taboo*), merupakan bentuk pengaturan sebuah wacana. Ketabuan merupakan bentuk prosedur yang menempatkan suatu wacana pada posisi yang membuat orang sulit bahkan dinilai tercela untuk membicarakannya secara bebas. Dalam konteks Michel Foucault, "tabu" merujuk pada praktik sosial yang secara sistematis menekan atau mengatur diskursus tertentu, seperti seksualitas, demi mempertahankan kontrol atau kekuasaan (Salamet, 2020). Dalam hal politik identitas, tabu tersebut memiliki kesamaan karena melibatkan pembatasan wacana tertentu di ruang publik. Politik identitas dianggap tabu karena potensi destruktifnya, mempertegas perbedaan, menciptakan segregasi sosial, atau menimbulkan konflik. Pendisiplinan yang ingin dicapai dengan men-tabu-kan politik identitas adalah menciptakan ruang publik yang "netral" atau "inklusif," sehingga wacana yang dianggap memecah-belah tidak mendominasi. Namun, seperti dalam kajian Foucault, penekanan ini juga dapat dilihat sebagai mekanisme kekuasaan untuk mendefinisikan narasi dominan dan meminggirkan wacana tertentu.

### C. METODE

Peneliti menggunakan metode Analisis Wacana Kritis (AWK) untuk menggambarkan perspektif ideologis dalam teks dan jejak dari ideologi, menganalisis hubungan antara bahasa dan struktur kekuasaan (Herman, 2022; Salamet, 2020). AWK merupakan lanjutan dari analisis wacana yang pertama kali dikembangkan oleh Zelig Harris pada tahun 1952 ketika ia menulis artikel berjudul "*Discourse Analysis*" yang dimuat dalam majalah *Language* (Harris, 1952). Penelitian ini menggunakan analisis wacana kritis dengan pendekatan Norman Fairclough. Fairclough menjelaskan pendekatannya dalam analisis wacana kritis melalui bukunya, yaitu: *Language and Power* (1989), *Media Discourse* (1995) dan *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language* (1995). Fairclough berupaya menggabungkan teori-teori wacana Foucault dan hegemoni Gramsci pada ilmu sosial dengan ilmu linguistik seperti teori intertekstualitas, untuk melahirkan linguistik kritis. Kombinasi digunakan untuk mengungkap relasi kekuasaan serta ideologi yang hadir di balik teks.

Norman Fairclough membagi analisisnya ke dalam tiga framework,

yaitu: Analisis Teks, Analisis Interaksi (*Discourse Practice*), Analisis Konteks (*Socio-politic practice*) (Fairclough, 2013).



**Gambar 1. Three-Dimensional Framework Fairclough**

Dalam wilayah teks, deskripsi digunakan untuk mendapatkan gambaran bagaimana teks dipresentasikan berdasarkan genre, tipe ataupun kategorinya. Dalam wilayah interaksi, interpretasi digunakan untuk menganalisis proses, yakni menginterpretasikan teks dan bagaimana teks dikonsumsi dan diinterpretasikan oleh pembaca. Tahap analisis ketiga pada wilayah konteks, adalah eksplanasi yang berfokus pada penggambaran diskursus sebagai bagian dari praktik sosial dan menunjukkan determinasinya terhadap struktur sosial dan efek reproduktifnya

terhadap struktur-struktur tersebut, baik efeknya memaparkan ataupun mengubah struktur (Munfarida, 2014).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah naskah pidato Jokowi selama periode 2020-2023 karena pada periode tersebut melibatkan fase penting dalam konteks sosial dan politik Indonesia yang akan menghadapi tahun politik, yaitu Pilkada serentak tahun 2020 serta Pemilu 2024. Pidato ini dianggap sebagai sumber primer yang dapat dianalisis untuk mengungkap wacana resmi pemerintah, dinamika politik, dan pendekatan komunikasi yang digunakan dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat. Data didapatkan dari situs media online Kementerian Sekretariat Kabinet Republik Indonesia ([www.setkab.go.id](http://www.setkab.go.id)) yang menyediakan arsip pidato-pidato presiden. Pertimbangan menjadikan website ini sebagai sumber data, yaitu kelengkapan data pidato yang disajikan dalam setiap kegiatan Presiden serta transkrip merupakan murni isi pidato tanpa ada penambahan atau pengurangan redaksi. Data diseleksi hanya pada pidato yang mengandung frase 'politik identitas', 'politisasi SARA' atau 'politisasi agama' dalam pidatonya.

D. TEMUAN

Dalam kurun waktu 2020-2023, Jokowi sebelas kali menyinggung politik identitas dalam pidato-pidatonya. Pidato disampaikan dalam beragam konteks acara. Berikut adalah hasil penelusuran:

Tabel 1. Pernyataan Jokowi tentang politik identitas dalam pidato kurun waktu 2020-2023.

PIDATO NO.	ACARA	TEKS
1.	Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura. (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia _ Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura Masa Bakti 2019-2024, 24 Januari 2020, Di Jakarta Convention Centre, Provinsi DKI Jakarta, n.d.)	<i>"Tahun ini, tahun 2020 kita akan Pilkada serentak di 270 daerah. Saya hanya titip marilah kita menjaga agar Pilkada yang sebanyak 270 itu berjalan aman, berjalan damai, bermartabat, dan demokratis. Jangan sampai ada lagi politik SARA. Setop! Enggak ada itu. Jangan lagi ada hoaks, jangan lagi ada ujaran-ujaran kebencian, jangan lagi saling fitnah, jangan lagi ada saling hujat menghujat".</i>
2.	Pidato di hadapan Anggota Parlemen Australia, 10 Februari 2020, di Gedung Parlemen, Canberra, Australia (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia _ Pidato Di Hadapan Anggota Parlemen Australia, 10 Februari 2020, Di Gedung Parlemen, Canberra, Australia, n.d.)	<i>"Di tengah berbagai tantangan tersebut, Indonesia dan Australia harus fokus pada upaya peningkatan kemitraan. Saya mengusulkan beberapa agenda prioritas menyongsong satu abad kemitraan kita. Pertama, kita harus terus memperjuangkan nilai demokrasi, hak asasi manusia, toleransi, dan kemajemukan. Setop intoleransi, setop xenophobia, setop radikalisme, setop terorisme. Terus kikis politik identitas di negara kita dan di berbagai belahan dunia, baik itu atas dasar agama, etnisitas, identitas askriptif lainnya. Politik identitas merupakan ancaman terhadap kualitas demokrasi, ancaman bagi kemajemukan, dan ancaman bagi toleransi. Ancaman ini semakin nyata jika terus dieksploitasi demi kepentingan politik jangka pendek yang mengakibatkan kebencian, ketakutan, bahkan konflik sosial".</i>
3.	Rapat Persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, 10 April 2022 (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia _ Rapat Persiapan Pemilu Dan Pilkada Serentak Tahun 2024, Di Istana	<i>"...dan menjelang kontestasi politik ini biasanya suhu menghangat itu biasa, tapi jangan sampai masyarakat terprovokasi oleh kepentingan-kepentingan politik yang tidak bermanfaat. Oleh sebab itu, saya juga minta dilakukan edukasi, dilakukan pendidikan politik yang masif kepada masyarakat, kepada para kontestan, jangan membuat isu-isu politik yang tidak baik, terutama isu-isu politik identitas yang mengedepankan isu</i>

PIDATO NO.	ACARA	TEKS
	<i>Kepresidenan B 2022-10-03 22_20_26Z, n.d.)</i>	<i>politik SARA. Saya kira kita memiliki pengalaman yang tidak baik di pemilu-pemilu sebelumnya, kita harapkan ini tidak terjadi di 2024”.</i>
4.	Keterangan Pers Presiden RI terkait Pelantikan KPU dan Bawaslu, di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta, 12 April 2022 (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia   Keterangan Pers Presiden RI Tekait Pelantikan KPU Dan Bawaslu, 12 April 2022 TRANSKRIP PRESIDEN RI, n.d.)	<i>“Saya titip agar KPU juga menekankan soal pendidikan politik pada masyarakat. Jangan lagi membuat masyarakat terprovokasi oleh isu-isu politik identitas. Kita ajak masyarakat menyambut Pemilu dengan gembira sebagai pesta demokrasi rakyat”.</i>
5.	Pidato Presiden RI Pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka HUT Ke-77 Proklamasi Kemerdekaan RI, di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Provinsi DKI Jakarta, 16 Agustus 2022. (“Pidato Presiden RI Pada Sidang Tahunan MPR RI Dan Sidang Bersama DPR RI Dan DPD RI Dalam Rangka HUT Ke-77 Proklamasi Kemerdekaan RI,” 2022)	<i>“Adapun untuk tahapan Pemilu yang sedang dipersiapkan oleh KPU harus kita dukung sepenuhnya. Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat. Saya juga mengharapkan dukungan dari semua lembaga-lembaga negara untuk menjaga dan membangun demokrasi di negeri kita ini, untuk memperkokoh ideologi bangsa”.</i>
6.	Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) XVII Tahun 2022, di Ballroom Hotel Alila Solo, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, 21 November 2022. (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia _ Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) XVII Tahun 2022, Di Ballroom Hotel Alila Solo, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, 21 November 2022 _ TRAN, n.d.)	<i>“Inilah yang sekali lagi saya ingatkan kepada para Capres dan Cawapres untuk membawa suasana politik kita menuju 2024 itu betul-betul paling banter hangat sedikit, syukur bisa adem. Debat silakan, debat gagasan, debat ide membawa negara ini lebih baik, silakan, tapi jangan sampai panas, apalagi membawa politik-politik SARA, tidak, jangan. Politisasi agama, tidak, jangan. Setuju? Politisasi agama, jangan. Jangan. Kita sudah merasakan dan itu terbawa lama. Hindari ini. Lakukan politik-politik gagasan, politik-politik ide, tapi jangan masuk ke politik SARA, politisasi agama, politik identitas, jangan. Sangat berbahaya bagi negara sebesar kita Indonesia yang sangat beragam”.</i>

PIDATO NO.	ACARA	TEKS
7.	Konsolidasi Nasional Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, di Hotel Bidakara, Provinsi DKI Jakarta, 17 Desember 2022. (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia _ Konsolidasi Nasional Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Di Hotel Bidakara, Provinsi DKI Jakarta, 17 Desember 2022 _ TRANSKRIP PRESIDEN RI, n.d.)	<i>"...dan salah satu faktor kerawanan di Pemilu-Pemilu, di Pilkada-Pilkada itu adalah soal politik identitas, politik SARA, dan hoaks. Ini hati-hati mengenai ini. Hati-hati, kita ini beragam agama, suku, ras, beragam. Jadi hati-hati kalau ada percikan kecil mengenai ini. Segera diperingatkan, enggak usah ragu-ragu, segera peringatkan, panggil sudah, pasti grogi. Sekali lagi, kita tidak bisa bersantai-santai dengan politik identitas, politisasi agama, politik SARA. Jangan berikan ruang apapun kepada ini, ini sangat berbahaya sekali. Ini bisa menjadi peluang pihak lain untuk memecah belah keutuhan negara kita, keutuhan kita sebagai sebuah bangsa".</i>
8.	Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional dan Musyawarah Dewan Partai Bulan Bintang (PBB) Tahun 2023, 11 Januari 2023, di Ballroom eL-Royal Hotel, Kelapa Gading, Provinsi DKI Jakarta (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia _ Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Dan Musyawarah Dewan Partai Bulan Bintang (PBB) Tahun 2023, 11 Januari 2023, Di Ballroom EL-Royal Hotel, Kelapa Gading, Provinsi DKI J, n.d.)	<i>"...dan kita harapkan dalam kontestasi politik Pilpres maupun Pileg, saya selalu titip, jangan menggunakan politik identitas. Sekarang ini bukan eranya lagi politik gontok-gontokan. Sekarang ini eranya adu gagasan, kontestasi program, mengadu ide".</i>
9.	Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia Tahun 2023, di Sentul International Convention Centre, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, 17 Januari 2023. (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia _ Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah Dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Se-Indonesia Tahun 2023, Di Sentul International Convention Centre, Kabupaten Bogor, Pr, n.d.)	<i>"Yang terakhir, masalah stabilitas politik dan keamanan menuju pada Pemilu 2024. Saya minta betul-betul Saudara-Saudara bisa menjaga situasi kondusif, menjaga agar masyarakat kita tidak menjadi korban politik, namanya politik identitas".</i>

PIDATO NO.	ACARA	TEKS
10.	Resepsi Puncak Satu Abad Nahdlatul Ulama di Gelora Delta Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, 7 Februari 2023. (Resepsi Puncak Satu Abad Nahdlatul Ulama Di Gelora Delta Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, 7 Februari 2023, 2023)	<i>"Pemerintah sangat menghargai upaya PBNU untuk ikut membangun peradaban dunia yang lebih baik dan lebih mulia. Sebagai organisasi Islam yang mengakar kuat di masyarakat, NU telah menjaga ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan-tantangan, dalam menghadapi pandemi COVID-19, dalam menghadapi hantaman gerakan-gerakan radikal, termasuk menjaga diri dari politik identitas dan ekstremisme".</i>
11	Amanat Presiden Joko Widodo pada Peringatan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2023. (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia _ Peringatan Hari Lahir Pancasila, Di Sisi Selatan Monumen Nasional, Provinsi DKI Jakarta, 1 Juni 2023 _ TRANSKRIP PRESIDEN RI, n.d.)	<i>"Toleransi, persatuan, dan gotong royong adalah kunci membangun bangsa yang kokoh. Oleh sebab itu, saya mengajak kita semuanya untuk menolak ekstremisme, menolak politisasi identitas, menolak politisasi agama. Mari kita menyambut pesta demokrasi Pemilu 2024 dengan kedewasaan, dengan sukacita, dengan memegang teguh nilai-nilai Pancasila, memperjuangkan Indonesia maju, yang adil, yang sejahtera, serta berwibawa di kancah dunia".</i>

## E. BAHASAN

### Analisis Teks

Dalam analisis teks, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan linguistik yang mencakup kosakata, tata bahasa dan struktur tekstual. Analisis pada dimensi teks bisa dilihat pada penggunaan kosakata tertentu yang berlebihan yang berarti preferensi produsen teks terhadap aspek tertentu dari realitas (Munfarida, 2014). Dalam hal ini, bagaimana preferensi Jokowi terhadap politik identitas terlihat dari kosakata yang digunakan dalam pidatonya. Kata atau frase yang

digunakan untuk menggantikan kata yang lain dinilai sebagai perwakilan yang mudah dikenali dan memainkan peran unik secara keseluruhan. Pada studi linguistik hal ini dikenal sebagai majas metonimia (Hidayat, 2022). Beberapa metonim yang dipilih Jokowi dalam pidatonya adalah: *"politisasi SARA"* (Pidato No. 1, Pidato No. 3, Pidato No. 6, dan Pidato No. 7), *"politisasi agama"* (Pidato No. 2, Pidato No. 5, Pidato No. 6, Pidato No. 7 dan Pidato No. 11), dan *"ekstrimis"* (Pidato No. 10 dan Pidato No. 11).

Analisis pada dimensi teks juga melihat penggunaan skema klasifikasi

yang menunjukkan pembagian realitas yang dibuat berdasarkan representasi ideologis tertentu. Skema klasifikasi akan mengungkap adanya representasi positif pada diri sendiri (*positive self-representation*) dan representasi negatif pada orang lain (*negative other-representation*), (Fauzan, 2016). Jokowi dalam pidatonya selalu menghadapi politik identitas dengan demokrasi. Politik identitas diklasifikasikan secara negatif sebagai ancaman bagi demokrasi (Pidato No. 2, Pidato No. 4, Pidato No. 5, Pidato No. 11).

Penggunaan metonim politisasi SARA dan politisasi agama yang merepresentasikan politik identitas oleh Jokowi, dalam ranah komunikasi politik termasuk kedalam *name calling*. *Name Calling* adalah salah satu teknik propaganda dengan memberikan sebuah ide atau label yang buruk dengan tujuan agar orang menolak dan meragukan ide tertentu tanpa mengoreksinya terlebih dahulu (Juariyah, 2019). Propaganda ancaman politik identitas yang dilakukan Jokowi bertujuan untuk mempengaruhi opini publik untuk menyamakan pengertian politik

identitas dengan politisasi SARA, politisasi agama, bahkan politik ekstrimis. Menempatkan politisasi SARA dan politisasi agama sebagai metonim telah mengakibatkan terjadinya penyempitan makna dari politik identitas. Hal ini tentu bertentangan dengan referensi-referensi yang sudah diuraikan sebelumnya. Politik identitas merupakan bentuk perlawanan mereka yang terpinggirkan identitasnya oleh dominasi kekuasaan dengan beragam bentuk (Salim, 2022; Soenjoto, 2019).

### **Analisis Interaksi (*Discourse Practice*)**

*Discourse practice* merupakan dimensi yang berhubungan dengan proses produksi dan konsumsi teks. Fokus analisis interaksi diarahkan pada cara pengarang teks mengambil wacana dan genre yang ada dengan memperhatikan bagaimana hubungan kekuasaan dimainkan (Haryatmoko, 2015). Dalam penelitian ini, fokus analisis diarahkan pada bagaimana Jokowi memandang politik identitas serta bagaimana dia memainkan posisinya sebagai pemegang kekuasaan untuk

mempengaruhi pandangan orang di sekitarnya.

Sebagaimana dalam analisis teks sebelumnya, Jokowi menyamakan politik identitas dengan politisasi SARA dan agama. Jokowi memandang persoalan-persoalan yang melibatkan SARA sebagai ancaman bagi integrasi bangsa. Pandangan ini didorong oleh pengalaman hidupnya, jauh sebelum menjadi Presiden (Haryono & setyawan, 2019).

Sebagai orang yang besar di kota Surakarta, Jokowi menyaksikan langsung konflik-konflik rasial telah menghancurkan kota Surakarta. Tercatat selama orde baru, kerusuhan rasial di kota Surakarta terjadi pada tahun 1972, 1980 dan 1998 (Putro Yahya Aryanto et al., 2017). Selain itu, dalam perjalanan karier politiknya, Jokowi mengalami sendiri serangan politik identitas dalam pemilihan Gubernur 2012, maupun pemilihan Presiden 2014 dan 2019 (Miichi, 2014; Panuju, 2019). Semua perjalanan hidupnya telah mendorong Jokowi untuk menempatkan politik identitas sebagai sebuah ancaman.

Posisi Jokowi sebagai pemegang kekuasaan telah memudahkan baginya untuk mempengaruhi pandangan orang atau lembaga. Melalui buzzer

professional Jokowi menyampaikan pesan-pesan politiknya dan membentuk opini publik (Firdausi, 2021). Tercatat beberapa lembaga seperti Bawaslu, KPU, Polri hingga BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) menyuarakan pendapat yang serupa dengannya yang memandang politik identitas secara negatif (Muliawati, 2022; Poernawan, 2022) Bahkan Kepala BPIP menyatakan bahwa agama adalah musuh terbesar Pancasila ketika merespon meningkatnya praktik politik identitas (Gunawan, 2020). Hasil penelitian (Prayoga et al., 2020), dalam analisis institusional mengungkapkan bahwa pernyataan tersebut diungkapkan oleh Yudian Wahyudi selaku Kepala BPIP karena lembaganya berada di bawah naungan Presiden sehingga harus berpihak kepada pemerintah.

Respon yang sama juga diberikan oleh partai pendukung pemerintah, yakni PPP dan PAN walaupun kedua partai tersebut berasaskan identitas agama (Islam). PPP secara tegas dalam anggaran dasarnya menyatakan sebagai partai *"berasaskan Islam, dengan bercirikan Ahlusunnah wal jama'ah"* (PPP, 2016). Sementara itu PAN sebagaimana anggaran dasarnya, menyatakan *"berasaskan akhlak politik berlandaskan*

*agama yang membawa rahmat bagi sekalian alam”* (PAN, 2024)

Meskipun kedua partai ini dalam anggaran dasarnya menyatakan bahwa agama menjadi identitas politiknya, namun dalam beberapa kesempatan pimpinan kedua partai tersebut menyatakan ketidaksetujuan terhadap politik identitas. Keduanya bersepakat untuk menjauhi politik identitas dalam Pemilu 2024 (Batlolone, 2022). Bangunan sebagai partai koalisi pemerintah telah mengikat secara psikologis partai seperti PPP dan PAN untuk bersikap yang sama dengan Jokowi meskipun keduanya merupakan partai berlandaskan identitas agama (Islam).

### **Analisis Konteks (Socio-Politic Practice)**

Indonesia menganut sistem politik perwakilan dalam demokrasinya, baik keterwakilan kehadiran (*politice of presence*) maupun keterwakilan primordial, (Samosir, 2021). Politik perwakilan ini membuat politik identitas diterima sebagai sebuah kewajaran pada perhelatan pemilihan umum di periode awal. Dalam pandangan Budiman Sudjatmiko, 2012, saat itu politik di Indonesia

digambarkan sebagai era politik aliran, era politik kualitatif yang berbasis identitas atau keterorganisasian ide (Maarif, 2010).

Selama masa orde baru, di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, politik identitas dibungkam keras. Penerapan azas tunggal Pancasila di seluruh sudut bernegara diwajibkan sepanjang pemerintahan Orde Baru (1966-1998). Selama periode ini ditandai dengan pengekan HAM dan suara-suara kritis masyarakat sipil. Politik identitas dikubur dalam-dalam untuk alasan kondusivitas masyarakat. Namun demikian, pengekan ini justru mendorong terjadinya letupan sosial yang destruktif, seperti saat terjadi konflik horizontal di Surakarta tahun 1972 dan 1980. Konflik sosial ini pun terus terjadi hingga pada masa awal era reformasi (tahun 2000-2001) seperti kersuhuan rasial di Poso dan Sampit.

Dalam era reformasi, politik identitas mulai tumbuh kembali. Pancasila tidak lagi menjadi azas tunggal bagi organisasi politik maupun kemasyarakatan. Hal ini mendorong lahirnya partai-partai yang berasaskan agama, baik Islam, Kristen maupun agama lain. Dalam

periode reformasi ini pula akhirnya diakomodir daerah-daerah berotonomi khusus seperti provinsi Aceh dan Papua sebagai pengakuan atas kekhususan identitas yang dimiliki suatu wilayah. Pada era ini, politik identitas secara terbatas mendapatkan salurannya dan diakui oleh negara. Gerakan-gerakan *civil society* seperti pengarusutamaan gender, dengan mewajibkan 30% perempuan dalam daftar calon anggota legislatif, dan pengakuan hak-hak masyarakat adat seperti undang-undang tentang Desa Adat, mulai mendapatkan tempatnya.

Namun demikian propaganda telah berhasil memisahkan politik identitas dari gerakan *civil society*. Politik identitas hanya dilihat sebagai politisasi SARA atau politisasi agama. Politik identitas juga dinilai sebagai antitesis dari nasionalisme. Hal ini menjadikan politik identitas begitu tabu untuk didiskusikan di ruang publik. Politik identitas dianggap tabu karena potensi destruktifnya, mempertegas perbedaan yang tidak sejalan dengan nasionalisme. Pendapat berbeda tentangnya dianggap mengancam persatuan.

Lebih jauh, propaganda politik identitas sebagai sesuatu yang negatif, telah mendorongnya 'hanya' menjadi sebuah 'permainan simbol' untuk mendapatkan dukungan. Hasil beberapa penelitian menegaskan bagaimana para politisi saat ini menggunakan identitas agama dan etnis untuk sekadar meningkatkan elektabilitas mereka dalam politik praktis (Horz, 2023; Muhtadi, 2019; Prasetya, 2023; Sumaktoyo, 2021; Syarwi, 2022). Politik identitas tidak lagi dipandang sebagai sebuah pengorganisasian ide atau fondasi nilai seperti pada awal periode kemerdekaan.

Lekatnya politik identitas dengan politisasi agama dan etnis dalam propaganda saat ini, serta bergesernya nilai politik identitas hanya sebagai strategi elektoral, telah menutupi bentuk awal politik identitas sebagai politik perjuangan kaum minoritas atas hegemoni mayoritas. Bentuk-bentuk lain dari politik identitas seperti pengakuan hak perempuan dan masyarakat adat, maupun keberadaan otonomi khusus seperti terlupakan.

## F. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis Norman Fairclough, propaganda ancaman politik identitas dalam teks pidato-pidato Jokowi dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dalam dimensi teks propaganda ancaman politik identitas ditampilkan melalui *name calling* sebagai politisasi SARA dan politisasi agama. *Name calling* telah menjadikan politik identitas hanya dilihat sebagai politisasi SARA dan agama saja.

Propaganda dalam dimensi praktik wacana, pada sisi propduksi, Jokowi memandang politik identitas secara negatif. Pada sisi konsumsi, kedudukan Jokowi sebagai pemegang kekuasaan

telah mempengaruhi pandangan dari lembaga-lembaga di bawahnya. Bangunan sebagai partai koalisi pemerintah juga telah mengikat secara psikologis partai PPP dan PAN untuk bersikap yang sama dengan Jokowi meskipun keduanya merupakan partai berlandaskan identitas agama (Islam).

Dalam dimensi sosial-politik, politik identitas terus muncul tenggelam dan mengalami pergeseran nilai. Propaganda telah berhasil memisahkan politik identitas dari gerakan *civil society* dan menempatkannya sebagai antithesis dari nasionalisme hal ini menjadikan politik identitas sebagai sesuatu yang tabu untuk dibicarakan di ruang publik.

## REFERENSI

- Ardipandanto, A. (2020). Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme [The Impact of Identity Politics On President Election 2019: Populism Perspective]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 11(1), 43-63. <https://doi.org/10.22212/jp.v11i1.1582>
- Batlolone, V. (2022). *Berkoalisi dengan Golkar dan PPP, PAN Tak Ingin Ada Pertarungan Ideologi dan Politik Identitas*.
- Bennett, W. L. (2012). The Personalization of Politics: Political Identity, Social Media, and Changing Patterns of Participation. *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 644(1), 20-39. <https://doi.org/10.1177/0002716212451428>
- Fairclough, N. (2013). *Critical Discourse Analysis "The Critical Study of Language"* (second edi). Routledge.
- Fauzan, U. (2016). Analisis Wacana Kritis: Menguak Ideologi dalam Wacana. *Idea Press*, 223. <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/ls/article/view/2087>
- Firdausi, I. (2021). Gaduh Buzzer Politik di Era Jokowi. *Komunika*, 8(1), 19-24. <https://doi.org/10.22236/komunika.v8i1.6979>

- Foucault, M. (1972). Archaeology. In *The Archaeology of knowledge and the discourse on language* (Vol. 1). Pantheon Books. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-823677-2.00010-6>
- Gunawan, D. (2020). Kepala BPIP Sebut Agama Jadi Musuh Terbesar Pancasila. In *Detiknews*. <https://news.detik.com/berita/d-4895595/kepala-bpip-sebut-agama-jadi-musuh-terbesar-pancasila>
- Hall, S. (1997). *REPRESENTATION Cultural Representations and Signifying Practices*. [https://fotografiaeteoria.wordpress.com/wp-content/uploads/2015/05/the\\_work\\_of\\_representation\\_\\_stuart\\_hall.pdf](https://fotografiaeteoria.wordpress.com/wp-content/uploads/2015/05/the_work_of_representation__stuart_hall.pdf)
- Harris, Z. (1952). Discourse Analysis Author ( s ): Zellig S . Harris Published by : Linguistic Society of America Stable URL : <http://www.jstor.org/stable/409987>. *Language*, 28(1), 1-30.
- Haryanto, I. (2015). Propaganda, Hannah Arendt, Joseph Goebels dan Totalitarianisme. *Jurnal ULTIMA Comm*, 7(1), 96-106. <https://doi.org/10.31937/ultimacomm.v7i1.425>
- Haryatmoko, J. (2015). Kondisi Ideologis Dan Derajat Keteramalan Analisa Wacana Kritis Norman Fairclough. *Diskursus*, 14(2), 153-192.
- Haryono & setyawan. (2019). makna dibalik pesan politik kebangsaan presiden jokowi. *Dialektika Komunika*, 1-23. <https://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/6961>
- Herianto, H., & Wijanarko, R. (2022). Populisme Berwajah Politik Identitas Keagamaan di Indonesia. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 5(1), 53-64. <https://doi.org/10.23887/jfi.v5i1.39581>
- Herman. (2022). *A Guide to Discourse Analysis as Theory And Practice* (Vol. 1, Issue August 2022). <https://www.researchgate.net/publication/369912993>
- Heyes, C. (2020). *Identity Politics*.
- Hidayat, F. (2022). Gaya Bahasa Metonimia dalam Lirik Lagu Iwan Fals Bertema Kritik Sosial. *Deiksis*, 14(3), 302. <https://doi.org/10.30998/deiksis.v14i3.14253>
- Horz, C. M. (2023). Identity Propaganda. *British Journal of Political Science*, 80(2), 313-338. <https://doi.org/10.1017/S0007123423000182>
- Imran, I., Sultan, S., & Mayong Maman. (2024). Wacana Politik Identitas dalam Pidato Calon Presiden RI 2024. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, Dan Sastra*, 10(2), 1864-1876. <https://doi.org/10.30605/onoma.v10i2.3618>
- Juariyah. (2019). *Opini Publik Dan Propoganda*. 1-66. [http://repository.unmuhjember.ac.id/13722/1/BUKU\\_OPINI\\_PUBLIK %26 PROPAGANDA pdf.pdf](http://repository.unmuhjember.ac.id/13722/1/BUKU_OPINI_PUBLIK_%26_PROPAGANDA.pdf.pdf)
- Khan, N. (2020). Cultural Representations. *A Cultural History of Hair in the Modern Age*, 163-180. <https://doi.org/10.5040/9781474206013.0012>
- Kreiss, D., Lawrence, R. G., & McGregor, S. C. (2020). Political Identity Ownership: Symbolic Contests to Represent Members of the Public. *Social Media and Society*, 6(2). <https://doi.org/10.1177/2056305120926495>
- Lasswell, H. D. (1927). The Theory of Political Propaganda Author ( s ): Harold D . Lasswell Source : The American Political Science Review , Vol . 21 , No . 3 ( Aug . , 1927 ) , pp . 627-631 Published by : American Political Science Association Stable URL : <http://www.jstor.org/s.> *The American Political Science Review*, 21(3), 627-631.

- Ludwig, G. (2021). Body politics and democracy. *Constellations*, 28(4), 537-554.  
<https://doi.org/10.1111/1467-8675.12473>
- Maarif, A. S. (2010). Pluralisme, Politik Identitas dan Krisis Identitas. In *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita* (pp. 50-57).
- Miichi, K. (2014). The Role of Religion and Ethnicity in Jakarta's 2012 Gubernatorial Election. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 33(1), 55-83.  
<https://doi.org/10.1177/186810341403300104>
- Mubarok, S. (2023). Akar politik identitas di Indonesia. *Jisiera: The Journal of Islamic Studies and International Relations*, 6(April), 1-19.
- Muhtadi, B. (2019). Populisme, Politik Identitas, dan Dinamika Elektoral (Populism, Identity Politics, and Electoral Dynamics). *UIN Syarif Hidayatullah*, 1-303.  
[https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/54388/1/Populisme Politik Identitas dan Dinamika Elektoral.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/54388/1/Populisme%20Politik%20Identitas%20dan%20Dinamika%20Elektoral.pdf)
- Muliawati, A. (2022). *Kapolri Komitmen Cegah Politik Identitas di 2024, Dorong Calon Adu Program*. <https://news.detik.com/pemilu/d-6487945/kapolri-komitmen-cegah-politik-identitas-di-2024-dorong-calon-adu-program>
- Munfarida, E. (2014). Analisis Wacana Kritis Dalam Perspektif Norman Fairclough. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 8(1), 1-19.  
<https://doi.org/10.24090/komunika.v8i1.746>
- Munthe, M. G. (2012). Propaganda dan Ilmu Komunikasi. *Jurnal ULTIMA Comm*, 4(1), 39-50. <https://doi.org/10.31937/ultimacomm.v4i1.429>
- Ningtyas, E. (2015). Pierre Bourdieu, Language and Symbolic Power. *Poetika*, 3(2).  
<https://doi.org/10.22146/poetika.v3i2.10437>
- Nordholt, H. S. (2018). Identity Politics, Citizenship and the Soft State in Indonesia: an Essay. *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*, 1(1), 1-21.  
<https://doi.org/10.14203/jissh.v1i1.1>
- PAN. (2024). *AD ART PAN*. PAN. <https://pan.or.id/wp-content/uploads/2024/10/Pengesahan-AD-ART-Kongres-ke-6-Jakarta-1.pdf>
- Panuju, R. (2019). Perjalanan Wacana Jokowi Dalam Pencalonannya Sebagai Kandidat Presiden 2019-2024. *Komuniti: Jurnal Komunikasi Dan Teknologi Informasi*, 10(2), 149-164. <https://doi.org/10.23917/komuniti.v10i2.6753>
- Pidato Presiden RI Pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka HUT Ke-77 Proklamasi Kemerdekaan RI. (2022). In *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*. <https://setkab.go.id/pidato-presiden-ri-pada-sidang-tahunan-mpr-ri-dan-sidang-bersama-dpr-ri-dan-dpd-ri-dalam-rangka-hut-ke-77-proklamasi-kemerdekaan-ri/>
- Poernawan, H. (2022). Bawaslu Minta Parpol Tak Gunakan Isu Politik Identitas. In *Badan Pengawas Pemilihan Umum*. <https://www.bawaslu.go.id/>
- PPP. (2016). *AD ART PPP 2019.pdf* (pp. 59-61).
- Prasetya, A. B. (2023). Konsep Simbolisasi Dan Identitas Politik Sebagai Bentuk Propaganda Di Indonesia. *Tuturlogi*, 4(2), 1.  
<https://doi.org/10.21776/ub.tuturlogi.2023.004.02.1>
- Prayoga, A., Mayasari, M., & Lubis, F. O. (2020). SARA'S REPRESENTATION IN DETIK.COM NEWS PORTAL (Norman Fairclough's Critical Discourse Analysis Statement

- by the Head of BPIP Calling Religion to be .... *SEMIOTIKA: Jurnal ...*, 14(2), 121-134. <https://journal.ubm.ac.id/index.php/semiotika/article/view/2234>
- Putro Yahya Aryanto, Atmaja Hamdan Tri, & Sodik Ibnu. (2017). Konflik Rasial Antara Etnis Tionghoa Dengan Pribumi Jawa di Surakarta Tahun 1972-1998. *Journal of Indonesian History*, 6(1), 66-74. <https://journal.unnes.ac.id/sju/jih/article/view/20031>
- Resepsi Puncak Satu Abad Nahdlatul Ulama di Gelora Delta Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, 7 Februari 2023. (2023). Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. <https://setkab.go.id/resepsi-puncak-satu-abad-nahdlatul-ulama-di-gelora-delta-sidoarjo-kabupaten-sidoarjo-provinsi-jawa-timur-7-februari-2023/>
- Salahudin, A. (2021). Biopolitik dan Ihlwal identitas. In *selasa, 22 Juni 2021* (p. 1).
- Salamet. (2020). Analisis Wacana Michel Foucault. In *Buku*. SUKA PRESS.
- Salim, A. (2022). Kesalahpahaman tentang Politik Identitas. *Uinjkt.Ac.Id*. <https://www.uinjkt.ac.id/id/kesalahpahaman-tentang-politik-identitas>
- Samosir, O. (2021). *Sistem Perwakilan Politik Di Era Modern*. UKI PRESS.
- Schubert, K. (2023). Identity politics and the democratization of democracy: Oscillations between power and reason in radical democratic and standpoint theory. *Constellations*, 1-17. <https://doi.org/10.1111/1467-8675.12715>
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia \_ Konsolidasi Nasional Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, di Hotel Bidakara, Provinsi DKI Jakarta, 17 Desember 2022 \_ TRANSKRIP PRESIDEN RI. (n.d.).
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia \_ Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) XVII Tahun 2022, di Ballroom Hotel Alila Solo, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, 21 November 2022 \_ TRAN. (n.d.). <https://setkab.go.id/musyawah-nasional-himpunan-pengusaha-muda-indonesia-hipmi-xvii-tahun-2022-di-ballroom-hotel-alila-solo-kota-surakarta-provinsi-jawa-tengah-21-november-2022/>
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia \_ Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional dan Musyawarah Dewan Partai Bulan Bintang (PBB) Tahun 2023, 11 Januari 2023, di Ballroom eL-Royal Hotel, Kelapa Gading, Provinsi DKI J. (n.d.).
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia \_ Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia Tahun 2023, di Sentul International Convention Centre, Kabupaten Bogor, Pr. (n.d.). <https://setkab.go.id/pembukaan-rapat-koordinasi-nasional-kepala-daerah-dan-forum-komunikasi-pimpinan-daerah-se-indonesia-tahun-2023-di-sentul-international-convention-centre-kabupaten-bogor-provinsi-jawa-barat-17-janu/>
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia \_ Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura Masa Bakti 2019-2024, 24 Januari 2020, di Jakarta Convention Centre, Provinsi DKI Jakarta. (n.d.).
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia \_ Peringatan Hari Lahir Pancasila, di Sisi Selatan Monumen Nasional, Provinsi DKI Jakarta, 1 Juni 2023 \_ TRANSKRIP PRESIDEN RI. (n.d.).
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia \_ Pidato di hadapan Anggota Parlemen Australia, 10 Februari 2020, di Gedung Parlemen, Canberra, Australia. (n.d.).

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia \_ Rapat Persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, di Istana Kepresidenan B 2022-10-03 22\_20\_26Z. (n.d.).

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | Keterangan Pers Presiden RI terkait Pelantikan KPU dan Bawaslu, 12 April 2022 TRANSKRIP PRESIDEN RI. (n.d.).

<https://setkab.go.id/penyataan-pers-presiden-ri-mengenai-pengalihan-subsidi-bbm/>

Soenjoto, W. P. P. (2019). Eksploitasi Isu Politik Identitas terhadap Identitas Politik pada Generasi Milineal Indonesia di Era 4.0. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 4(2), 187–217. <https://doi.org/10.21580/jish.42.5223>

Sumaktoyo, N. G. (2021). Ethnic and Religious Sentiments in Indonesian Politics: Evidence From the 2017 Jakarta Gubernatorial Election. *Journal of East Asian Studies*, 21(1), 141–164. <https://doi.org/10.1017/jea.2020.35>

Syarwi, P. (2022). Polarisasi Isu , Politik Identitas dan Keterbelahan Publik pada Pemilu Presiden Tahun 2019. *Jurnal Communitarian*, 4(1), 591–602. <https://doi.org/10.56985/jc.v4i1.228>

*The Story of Propaganda* | AHA. (2018). [https://www.historians.org/about-aha-and-membership/aha-history-and-archives/gi-roundtable-series/pamphlets/em-2-what-is-propaganda-\(1944\)/the-story-of-propaganda](https://www.historians.org/about-aha-and-membership/aha-history-and-archives/gi-roundtable-series/pamphlets/em-2-what-is-propaganda-(1944)/the-story-of-propaganda)